



Pengaruh Alokasi Belanja Publik Pro-Poverty dan Penyaluran Dana Zakat terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Aceh

Nur Raihan¹, Muhammad Nasir², Julia Alfianti³

^{1,2,3}Program Studi Manajemen Keuangan Sektor Publik, Jurusan Bisnis, Politeknik Negeri Lhokseumawe

E-mail: raihancaem2014@gmail.com¹, nasiraceh@pnl.ac.id², juliaqatsir@gmail.com³

Article Info

Article history:

Received August 24, 2026

Revised September 01, 2026

Accepted September 03, 2026

Keywords:

Poverty; Pro-Poverty Public Expenditure; Zakat; Panel Data; Aceh

ABSTRACT

Poverty remains one of the major development problems in Aceh Province. Although local governments have fiscal capacity through regional budgets and social protection programs, poverty remains relatively high. At the same time, Aceh has zakat as an Islamic social-finance instrument managed institutionally through Baitul Mal. This study aims to analyze the effect of pro-poverty public expenditure allocation and zakat fund distribution on the poverty rate in Aceh Province. The study employs a quantitative approach using panel data covering 23 regencies/cities in Aceh during 2019–2025, resulting in 161 observations. Secondary data were obtained from the Central Statistics Agency, the Directorate General of Fiscal Balance, regional budget realization reports, and Baitul Mal reports. Panel-data regression was estimated using the Common Effect Model, Fixed Effect Model, and Random Effect Model. Based on the Chow, Hausman, and Lagrange Multiplier tests, the Random Effect Model was selected as the most appropriate model. The results indicate that pro-poverty public expenditure allocation has a negative and significant effect on poverty, while zakat fund distribution has a positive and significant effect. Simultaneously, both independent variables significantly affect the poverty rate. The Adjusted R-squared of 0.061218 indicates that 6.12 percent of the variation in poverty is explained by the variables included in the model. The findings emphasize the need to improve the quality and targeting of pro-poverty expenditure and strengthen productive zakat distribution and coordination between local government and zakat institutions.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Article Info

Article history:

Received August 24, 2026

Revised September 01, 2026

Accepted September 03, 2026

ABSTRAK

Kemiskinan masih menjadi salah satu permasalahan utama pembangunan di Provinsi Aceh. Meskipun pemerintah daerah memiliki kapasitas fiskal melalui APBD dan berbagai program perlindungan sosial, tingkat kemiskinan di Aceh masih relatif tinggi. Di sisi lain, Aceh memiliki instrumen sosial-keuangan Islam berupa

**Kata Kunci:**

Kemiskinan; Belanja Publik
Pro-Poverty; Zakat; Data Panel;
Aceh

zakat yang dikelola secara kelembagaan melalui Baitul Mal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh alokasi belanja publik pro-poverty dan penyaluran dana zakat terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Aceh. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data panel yang mencakup 23 kabupaten/kota di Provinsi Aceh selama periode 2019–2025, sehingga diperoleh 161 observasi. Data penelitian bersumber dari Badan Pusat Statistik, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, laporan realisasi APBD, dan laporan Baitul Mal. Analisis dilakukan menggunakan regresi data panel dengan pendekatan Common Effect Model, Fixed Effect Model, dan Random Effect Model. Berdasarkan pengujian Chow, Hausman, dan Lagrange Multiplier, Random Effect Model merupakan model yang paling tepat digunakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa alokasi belanja publik pro-poverty berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Sebaliknya, penyaluran dana zakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Secara simultan, kedua variabel berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Nilai Adjusted R-squared sebesar 0,061218 menunjukkan bahwa 6,12 persen variasi tingkat kemiskinan dapat dijelaskan oleh variabel dalam model, sedangkan sisanya dijelaskan oleh faktor lain di luar penelitian. Temuan ini menunjukkan pentingnya peningkatan kualitas dan ketepatan sasaran belanja pro-poverty serta penguatan efektivitas penyaluran zakat produktif dan sinergi antara pemerintah daerah dengan lembaga pengelola zakat.

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.

**Corresponding Author:**

Nur Raihan
Politeknik Negeri Lhokseumawe
E-mail: raihancaem2014@gmail.com

PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan persoalan pembangunan yang bersifat multidimensional. Kemiskinan tidak hanya berkaitan dengan rendahnya pendapatan, tetapi juga keterbatasan akses terhadap pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, dan kesempatan ekonomi. Oleh karena itu, strategi pengentasan kemiskinan memerlukan kebijakan yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada pemerataan manfaat pembangunan.

Provinsi Aceh menghadapi persoalan kemiskinan yang kompleks. Dalam periode penelitian, tingkat kemiskinan mengalami dinamika antarwaktu dan antarwilayah. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengentasan kemiskinan masih menjadi agenda penting pembangunan daerah. Pemerintah daerah memiliki instrumen fiskal melalui APBD untuk memperluas pelayanan dasar dan memberikan perlindungan kepada kelompok miskin dan rentan.



Belanja publik pro-poverty merupakan pengeluaran pemerintah yang diarahkan pada sektor-sektor yang memberikan manfaat bagi kelompok miskin, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, perlindungan sosial, dan pemberdayaan ekonomi. Secara teoritis, peningkatan belanja pada sektor tersebut dapat mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin dan meningkatkan kapasitas ekonomi mereka. Namun, besarnya anggaran tidak otomatis menjamin keberhasilan pengentasan kemiskinan karena efektivitasnya bergantung pada kualitas perencanaan, ketepatan sasaran, pelaksanaan, dan pengawasan.

Selain kebijakan fiskal, zakat merupakan instrumen redistribusi dalam ekonomi Islam. Dana zakat dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar maupun meningkatkan kapasitas ekonomi mustahik melalui program produktif. Aceh memiliki karakteristik kelembagaan yang khas karena pengelolaan zakat dilakukan melalui Baitul Mal. Dengan demikian, zakat memiliki potensi untuk melengkapi kebijakan pemerintah dalam pengentasan kemiskinan.

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa belanja publik dan belanja sosial dapat berkontribusi terhadap pengurangan kemiskinan. Kuncoro dan Sari (2021) serta Yusuf dan Suhartono (2022) menunjukkan hubungan antara kebijakan fiskal dan penurunan kemiskinan. Di sisi lain, kajian mengenai zakat menunjukkan bahwa zakat dapat berfungsi sebagai instrumen redistribusi dan pemberdayaan ekonomi. Namun, penelitian yang menguji belanja publik pro-poverty dan penyaluran dana zakat secara bersamaan pada tingkat kabupaten/kota di Aceh masih terbatas.

Berdasarkan kesenjangan tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh alokasi belanja publik pro-poverty dan penyaluran dana zakat terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Aceh selama 2019–2025, baik secara parsial maupun simultan. Penelitian ini diharapkan memberikan bukti empiris bagi pengembangan kajian keuangan publik dan ekonomi Islam serta menjadi bahan evaluasi kebijakan pengentasan kemiskinan di Aceh.

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kemiskinan

Kemiskinan merupakan kondisi ketika individu atau rumah tangga tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar secara layak. Dalam perspektif pembangunan, kemiskinan dipengaruhi oleh faktor ekonomi dan struktural, termasuk pendapatan, kesempatan kerja, kualitas sumber daya manusia, akses pelayanan dasar, serta distribusi sumber daya. Pendekatan multidimensional menegaskan bahwa kemiskinan perlu dipahami secara lebih luas daripada sekadar kekurangan pendapatan (Alkire & Santos, 2022; Todaro & Smith, 2020).

2.2 Belanja Publik Pro-Poverty

Belanja publik pro-poverty adalah pengeluaran pemerintah yang diarahkan untuk memberikan manfaat relatif lebih besar kepada kelompok miskin dan rentan. Belanja pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, perlindungan sosial, dan pemberdayaan ekonomi dapat meningkatkan akses pelayanan dasar serta memperkuat kapasitas ekonomi masyarakat. Dalam perspektif keuangan publik, fungsi alokasi dan distribusi pemerintah memungkinkan sumber daya



publik diarahkan untuk mengurangi ketimpangan dan meningkatkan kesejahteraan (Musgrave & Musgrave, 2020; Mardiasmo, 2020).

2.3 Zakat dan Pengentasan Kemiskinan

Zakat merupakan instrumen redistribusi kekayaan dalam ekonomi Islam yang ditujukan kepada kelompok penerima yang berhak, termasuk fakir dan miskin. Zakat konsumtif dapat membantu pemenuhan kebutuhan dasar, sedangkan zakat produktif dapat diarahkan pada modal usaha, pelatihan, dan pemberdayaan ekonomi. Dalam konteks pengentasan kemiskinan, efektivitas zakat sangat dipengaruhi oleh ketepatan sasaran dan desain program pemberdayaan (Beik & Arsyianti, 2021; Aziz & Hosen, 2023).

2.4 Kerangka Pemikiran dan Hipotesis

Penelitian menempatkan tingkat kemiskinan sebagai variabel dependen, sedangkan alokasi belanja publik pro-poverty (X1) dan penyaluran dana zakat (X2) sebagai variabel independen. Hubungan yang diuji adalah $X1 \rightarrow Y$ dan $X2 \rightarrow Y$, serta pengaruh X1 dan X2 secara simultan terhadap Y.

H1: Alokasi belanja publik pro-poverty berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Aceh.

H2: Penyaluran dana zakat berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Aceh.

H3: Alokasi belanja publik pro-poverty dan penyaluran dana zakat secara simultan berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Aceh.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan regresi data panel. Unit analisis terdiri atas 23 kabupaten/kota di Provinsi Aceh dengan periode pengamatan 2019–2025, sehingga diperoleh 161 observasi. Data merupakan data sekunder yang bersumber dari Badan Pusat Statistik, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, laporan realisasi APBD, dan laporan Baitul Mal.

Variabel dependen adalah tingkat kemiskinan (Y), sedangkan variabel independen adalah alokasi belanja publik pro-poverty (X1) dan penyaluran dana zakat (X2). Pemilihan model dilakukan dengan membandingkan Common Effect Model (CEM), Fixed Effect Model (FEM), dan Random Effect Model (REM) melalui Chow Test, Hausman Test, dan Lagrange Multiplier Test.

Persamaan regresi panel yang digunakan adalah: $Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 X1_{it} + \beta_2 X2_{it} + \varepsilon_{it}$. Pengujian hipotesis dilakukan menggunakan uji t pada tingkat signifikansi 5 persen untuk pengaruh parsial dan uji F untuk pengaruh simultan. Koefisien determinasi digunakan untuk melihat kemampuan model menjelaskan variasi tingkat kemiskinan.



4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif menunjukkan rata-rata tingkat kemiskinan sebesar 14,84304, dengan nilai minimum 5,42 dan maksimum 20,78. Rata-rata alokasi belanja publik pro-poverty sebesar 27,28010, sedangkan rata-rata penyaluran dana zakat sebesar 18,667084. Data penelitian terdiri atas 161 observasi.

Variabel	Mean	Minimum	Maximum	Observasi
Tingkat Kemiskinan (Y)	14,84304	5,42	20,78	161
Belanja Pro-Poverty (X1)	27,28010	26,53959	28,14306	161
Penyaluran Zakat (X2)	18,667084	0	23,88328	161

Sumber: Output EViews 13 dalam skripsi penelitian.

4.2 Pemilihan Model Data Panel

Chow Test menghasilkan probabilitas Cross-section Chi-square sebesar 0,0000 sehingga Fixed Effect Model lebih tepat dibandingkan Common Effect Model. Hausman Test menghasilkan probabilitas 0,5176 sehingga Random Effect Model lebih tepat dibandingkan Fixed Effect Model. Selanjutnya, Lagrange Multiplier Test menghasilkan probabilitas Cross-section Breusch-Pagan sebesar 0,0000. Berdasarkan rangkaian pengujian tersebut, Random Effect Model dipilih sebagai model akhir.

4.3 Hasil Regresi Random Effect Model

Variabel	Koefisien	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	51,71625	18,32212	2,822613	0,0054
LNX1	-1,375419	0,671274	-2,048969	0,0421
LNX2	0,034726	0,011941	2,908228	0,0042

Sumber: Output EViews 13 dalam skripsi penelitian.

Persamaan regresi yang diperoleh adalah $Y = 51,71625 - 1,375419X1 + 0,034726X2$. Koefisien X1 yang negatif menunjukkan hubungan berlawanan arah dengan tingkat kemiskinan, sedangkan koefisien X2 yang positif menunjukkan hubungan searah.

4.4 Pengaruh Belanja Publik Pro-Poverty terhadap Kemiskinan

Alokasi belanja publik pro-poverty berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan dengan koefisien $-1,375419$ dan probabilitas 0,0421. Artinya, peningkatan alokasi belanja pro-poverty berkaitan dengan penurunan tingkat kemiskinan ketika variabel lain dianggap konstan. Temuan ini sejalan dengan Kuncoro dan Sari (2021) serta Yusuf dan Suhartono (2022). Secara substantif, belanja pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, dan perlindungan sosial dapat



mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin dan meningkatkan akses terhadap pelayanan dasar.

4.5 Pengaruh Penyaluran Dana Zakat terhadap Kemiskinan

Penyaluran dana zakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan dengan koefisien 0,034726 dan probabilitas 0,0042. Hubungan positif tersebut perlu ditafsirkan secara hati-hati. Hasil penelitian menduga bahwa penyaluran zakat bersifat responsif terhadap kondisi kemiskinan: ketika jumlah masyarakat miskin meningkat, kebutuhan bantuan meningkat sehingga dana zakat yang disalurkan juga dapat meningkat. Dengan demikian, koefisien positif tidak secara langsung menunjukkan bahwa zakat menyebabkan kemiskinan meningkat. Temuan ini juga memperkuat pentingnya pergeseran sebagian program zakat menuju pemberdayaan dan zakat produktif.

4.6 Pengaruh Simultan dan Koefisien Determinasi

Uji F menghasilkan F-statistic sebesar 6,216772 dengan probabilitas 0,002518. Nilai tersebut menunjukkan bahwa alokasi belanja publik pro-poverty dan penyaluran dana zakat secara simultan berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan pada taraf 5 persen.

Nilai Adjusted R-squared sebesar 0,061218 menunjukkan bahwa 6,12 persen variasi tingkat kemiskinan dapat dijelaskan oleh kedua variabel independen dalam model, sedangkan sekitar 93,88 persen dijelaskan oleh faktor lain di luar penelitian. Temuan ini menunjukkan bahwa kemiskinan merupakan fenomena multidimensional sehingga faktor seperti pertumbuhan ekonomi, pengangguran, inflasi, ketimpangan, dan kualitas sumber daya manusia berpotensi memiliki peran.

KESIMPULAN

- Alokasi belanja publik pro-poverty berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Aceh selama 2019–2025.
- Penyaluran dana zakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Hubungan positif tersebut diduga berkaitan dengan karakter penyaluran zakat yang responsif terhadap meningkatnya kebutuhan masyarakat miskin.
- Alokasi belanja publik pro-poverty dan penyaluran dana zakat secara simultan berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Namun, kemampuan kedua variabel dalam menjelaskan variasi kemiskinan relatif terbatas, dengan Adjusted R-squared sebesar 6,12 persen.

IMPLIKASI DAN SARAN

Pemerintah Provinsi Aceh perlu meningkatkan kualitas dan efektivitas belanja pro-poverty, terutama pada pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, perlindungan sosial, dan pemberdayaan ekonomi, dengan pengawasan dan evaluasi berbasis kinerja.



Baitul Mal dan lembaga pengelola zakat perlu memperkuat program zakat produktif melalui modal usaha, pelatihan keterampilan, pendampingan UMKM, dan pemberdayaan ekonomi agar manfaat zakat dapat berkelanjutan.

Sinergi pemerintah daerah dan Baitul Mal perlu diperkuat melalui pendataan penerima manfaat dan perencanaan program agar bantuan lebih tepat sasaran dan mengurangi potensi tumpang tindih.

Penelitian berikutnya disarankan menggunakan variabel kontrol tambahan seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, pengangguran, dan ketimpangan serta mempertimbangkan time lag untuk menangkap dampak penyaluran zakat yang mungkin tidak terjadi pada tahun yang sama.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, N., Hassan, M. K., & Wahab, N. (2022). Long-term impact of productive zakat on poverty alleviation: Evidence from Malaysia. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 13(4), 589–607.
- Alkire, S., & Santos, M. E. (2022). *Multidimensional poverty measurement and analysis: Ten years of MPI*. Oxford University Press.
- Aziz, A., & Hosen, M. N. (2023). The role of zakat institutions in poverty alleviation: Evidence from Indonesia. *Journal of Islamic Economics, Finance, and Banking*, 19(2), 45–60.
- Beik, I. S., & Arsyianti, L. D. (2021). Zakat and economic empowerment: Empirical evidence from Indonesia. *International Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, 7(2), 112–131.
- Kuncoro, M., & Sari, D. (2021). Public expenditure and poverty reduction in Indonesia: A regional analysis. *Economic Development Journal*, 29(3), 110–129.
- Mardiasmo. (2020). *Akuntansi sektor publik*. Andi Offset.
- Musgrave, R. A., & Musgrave, P. B. (2020). *Public finance in theory and practice* (8th ed.). McGraw-Hill Education.
- Ravallion, M. (2021). Pro-poor growth: Revisiting the evidence. *World Development*, 146, 105–127.
- Sugiyono. (2022). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2020). *Economic development* (13th ed.). Pearson Education.
- Yusuf, F., & Suhartono, D. (2022). Regional fiscal policy and poverty reduction in Indonesia: Empirical evidence from panel data. *Journal of Public Policy Studies*, 15(2), 89–104.